

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta : Gramedia.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2001, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Aziz Syamsuddin, 2013, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Baswir, 2000, *Majalah Kaligawe*, Semarang.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1992, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Yayasan Pengayoman.
- Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media.
- Husein Harum M, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Lawrence W. Friedman, 1984, *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co.
- Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudjana, Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, *Al Amwal*, Vol. 2, No. 1, Agustus 2019.

- Moeljatno, 2008, *Azas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moch. Faisal Salam, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- PAF Lamintang, 2000, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Riyadi, 2002, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jakarta : Gramedia.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia.
- Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Satochit Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Shahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Siswanto Sunaryo, 2004, *Penegakkan Hukum Psicotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Press.

\_\_\_\_\_, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta : Rajawali Pers.

\_\_\_\_\_, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Semaang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

\_\_\_\_\_, 2018, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Semarang : Fastindo.

Sudikno Mertokusumo, 2001, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sulaiman (Ed.), 2016, *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik, Sisi Lain Hukum yang Terlupakan*, Cetakan Kedua, Yogyakarta : Thafa Media, Yogyakarta.

Syed Husain Alatas, 1992, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta : LP3ES.

Victor M. Situmorang. 1994, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta, 2002

Undang-Undang Nomor RI 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### C. Jurnal

Gartiria Hutami dan Anis Chariri, Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang), Jurnal, <http://www.eprint.undip.ac.id>, diakses 21 Mei 2021.

Hulman Siregar, Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018.

Kusfitono, Umar Ma'ruf, Sri Kusriyah, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal", Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

Secsio Jimec Nainggolan dkk, Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborators* Dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN, *USU Law Journal*, Vol.5.No.3, Oktober 2017.

Susilawati, Peran Penyidik Polri Dalam Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Jurnal Hukum Kaidah*, Voume 19, Nomor 1, 2019.

Tito Satria Perdana, 2019, Peran Penyidik Utama Satuan Reskrim Polsek Gamping Dalam Upaya Penurunan Tingkat Kriminalitas di Wilayah Hukum Polsek Gamping, Tesis, Yogyakarta : Univesitas Janabadra.

Yusi Amdani, Formulasi Hukum Pidana Terkait Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017.

### D. Website

Data ICW 2020 Kerugian Negara Rp 567 Triliun Uang Pengganti dari Koruptor Rp 8,9 Triliun, <https://nasional.kompas.com>, diakses 21 Mei 2021.

Herman Budiyanto, Korupsi Dalam Islam, <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/korupsi-dalam-islam>, diakses 2 Agustus 2021.

Pandangan Islam Soal Korupsi dan Hukmannya, <https://www.unpak.ac.id>, diakses 1 Agustus 2021.

